

Studi Literatur Integrasi Isu Perubahan Iklim dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

M Fajar Anugerah¹; Mhd Rafi Yahya²; Ilham Yuri Nanda³

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab

³ Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji

e-mail: fajar.anugerah@univrab.ac.id

Received: December 2, 2025

Accepted: December 5, 2025

Published: December 10, 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui pendekatan studi literatur sistematis. Latar belakang penelitian berangkat dari tingginya emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau akibat deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi gambut yang menjadikan wilayah ini salah satu episentrum krisis iklim di Indonesia, sekaligus provinsi kunci dalam agenda emisi nol bersih 2060. Pemerintah pusat dan Provinsi Riau telah menetapkan berbagai kerangka kebijakan, termasuk agenda pembangunan rendah karbon "Riau Hijau" dan penandaan anggaran perubahan iklim, namun implementasinya di tingkat kabupaten masih menghadapi tantangan koordinasi, pendanaan, dan kelembagaan. Melalui Systematic Literature Review, artikel ini menelaah regulasi, dokumen perencanaan, serta studi-studi terdahulu terkait tata kelola iklim dan lingkungan di Rokan Hulu dan Riau, untuk memetakan sejauh mana isu mitigasi dan adaptasi telah diarusutamakan dalam kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai program pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan limbah sawit untuk energi, integrasi eksplisit isu perubahan iklim dalam dokumen kebijakan masih terbatas dan cenderung sektoral. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan strategi iklim daerah yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penajaman indikator dan penganggaran agar kontribusi Rokan Hulu terhadap target iklim nasional dan provinsi menjadi lebih terukur dan efektif.

Kata Kunci: *perubahan iklim, kebijakan daerah, tata kelola iklim, Rokan Hulu.*

Abstract

This study examines the integration of climate change issues into the policies of the Rokan Hulu District Government through a systematic literature review approach. The background of this study stems from the high greenhouse gas emissions in Riau Province due to deforestation, forest and land fires, and peat degradation, which have made this region one of the epicenters of the climate crisis in Indonesia, as well

as a key province in the 2060 net zero emissions agenda. The central government and Riau Province have established various policy frameworks, including the “Green Riau” low-carbon development agenda and climate change budget allocations, but their implementation at the regency level still faces challenges in terms of coordination, funding, and institutional capacity. Through a Systematic Literature Review, this article examines regulations, planning documents, and previous studies related to climate and environmental governance in Rokan Hulu and Riau, to map the extent to which mitigation and adaptation issues have been mainstreamed in regional policies. The results of the study show that although there are various environmental management programs and the use of palm oil waste for energy, the explicit integration of climate change issues in policy documents is still limited and tends to be sectoral. This study concludes that there is a need to strengthen more integrated regional climate strategies, increase institutional capacity, and refine indicators and budgeting so that Rokan Hulu's contribution to national and provincial climate targets becomes

Keyword:: *climate change, regional policy, climate governance, Rokan Hulu.*

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak di tingkat global, nasional, hingga daerah, termasuk di Provinsi Riau tempat Kabupaten Rokan Hulu berada. Laporan iklim BMKG menunjukkan tren peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang berkontribusi pada kenaikan suhu rata-rata dan perubahan pola cuaca ekstrem di Indonesia (Soejachmoen, 2017). Di Riau, laju deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta degradasi gambut menjadikan wilayah ini sebagai salah satu episentrum krisis iklim di Indonesia, dengan rata-rata emisi sekitar 100 MtCO₂e per tahun dari kehilangan tutupan pohon selama periode 2001–2024. Kondisi ini berimplikasi langsung pada meningkatnya frekuensi banjir, kabut asap, dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang bergantung pada sumber daya alam.

Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2024 deforestasi di Riau mencapai lebih dari 22 ribu hektare, dengan luas karhutla sekitar 10.674 hektare dan tren peningkatan kejadian dibanding tahun sebelumnya (Wahyudi et al., 2021). Kombinasi deforestasi, pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar, dan pengeringan lahan gambut memperkuat emisi karbon serta menurunkan kapasitas ekosistem untuk menyerap karbon, sehingga memperburuk dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Di sisi lain, Riau justru memiliki hampir lima juta hektare lahan gambut kaya karbon dan menjadi salah satu provinsi kunci dalam strategi nasional menuju emisi nol bersih 2060, termasuk potensi pemanfaatan mekanisme REDD+ untuk penghargaan atas penurunan emisi.

Dalam konteks tata kelola, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca dan mendorong daerah menyusun rencana pembangunan rendah karbon, yang di Riau dikenal dengan agenda “Riau Hijau” dengan indikator kinerja antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan emisi GRK (Kustiasih et al., 2014). Laporan penandaan anggaran perubahan iklim Provinsi Riau menunjukkan bahwa hingga 2021 upaya pemerintah mampu menghasilkan potensi penurunan emisi sekitar 204,61 juta ton CO₂ ekuivalen, namun masih menghadapi tantangan koordinasi, pendanaan, dan penguatan pemantauan serta pelaporan di tingkat kabupaten. Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit dan pengembangan energi berbasis limbah sawit memiliki kontribusi besar terhadap emisi sekaligus peluang besar untuk inovasi mitigasi perubahan iklim melalui tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Berbagai inisiatif lokal mulai bermunculan, seperti program Desa Mandiri Energi berbasis limbah kelapa sawit dan program lanskap berkelanjutan yang mendukung ribuan pekebun swadaya dalam praktik pertanian regeneratif untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Namun, inisiatif tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis ke dalam kebijakan daerah yang komprehensif tentang perubahan iklim, terutama pada level pemerintah kabupaten. Di Rokan Hulu juga terdapat gerakan dan aksi lingkungan seperti penanaman pohon dan kampanye pelestarian lingkungan yang menunjukkan adanya kesadaran institusional dan masyarakat, tetapi integrasi ke dalam dokumen kebijakan formal, perencanaan pembangunan, serta instrumen regulasi terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim masih perlu dikaji secara kritis (Mustikaningsih & Ananda, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami sejauh mana isu perubahan iklim telah diintegrasikan ke dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, baik pada tataran regulasi (peraturan bupati, perda, dan dokumen perencanaan) maupun program sektoral di bidang lingkungan, pertanian, energi, dan penanggulangan bencana (Zulaeha et al., 2022). Studi literatur yang sistematis akan membantu memetakan kesenjangan antara komitmen nasional dan provinsi dengan implementasi di tingkat kabupaten, mengidentifikasi kelemahan desain kebijakan, serta merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola iklim daerah yang berbasis bukti empiris. Dengan demikian, penelitian berjudul “Studi Literatur Integrasi Isu Perubahan Iklim dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu” menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih adaptif, responsif terhadap risiko iklim, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di Riau dan Indonesia.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA yang dimodifikasi untuk konteks kebijakan perubahan iklim pada tingkat pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Metode ini dipilih karena mampu memberikan telaah yang sistematis, transparan, dan replikasi terhadap bukti ilmiah dan dokumen kebijakan terkait integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan publik (Van Dinter et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan desain SLR berbasis protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

yang umum digunakan untuk kajian kebijakan dan administrasi publik, termasuk tema perubahan iklim (Moher et al., 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara kritis artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi terkait tata kelola perubahan iklim di Indonesia dan daerah. Fokus kajian diarahkan pada integrasi isu perubahan iklim ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan daerah, sehingga analisis lebih menekankan pada aspek governance, instrumen kebijakan, dan implementasi.

Metode ini dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang membahas tata kelola perubahan iklim di Indonesia dan daerah. Prosedur penelitian meliputi penelusuran artikel dan dokumen pada basis data ilmiah dan portal resmi pemerintah menggunakan kata kunci terkait kebijakan perubahan iklim dan tata kelola iklim lokal, kemudian dilakukan seleksi literatur dengan kriteria inklusi-eksklusi yang jelas (tema perubahan iklim-kebijakan, periode tahun tertentu, dan ketersediaan teks penuh). Setiap dokumen yang terpilih dikodekan dalam matriks berisi identitas studi, jenis dan level kebijakan, fokus tema (mitigasi, adaptasi, pendanaan, kelembagaan), serta temuan utama.

Data kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tren penelitian dan kebijakan, dilanjutkan analisis tematik untuk mengelompokkan isu-isu kunci (Komariah & Satori, 2022). Selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan (gap analysis) dengan membandingkan praktik dan ketentuan di berbagai daerah serta kerangka nasional dengan kondisi normatif yang diharapkan di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga terlihat sejauh mana isu perubahan iklim telah diintegrasikan dalam kebijakan pemerintah kabupaten. Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk sintesis naratif dan model konseptual integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan daerah yang dapat menjadi dasar rekomendasi penguatan tata kelola iklim di Rokan Hulu.

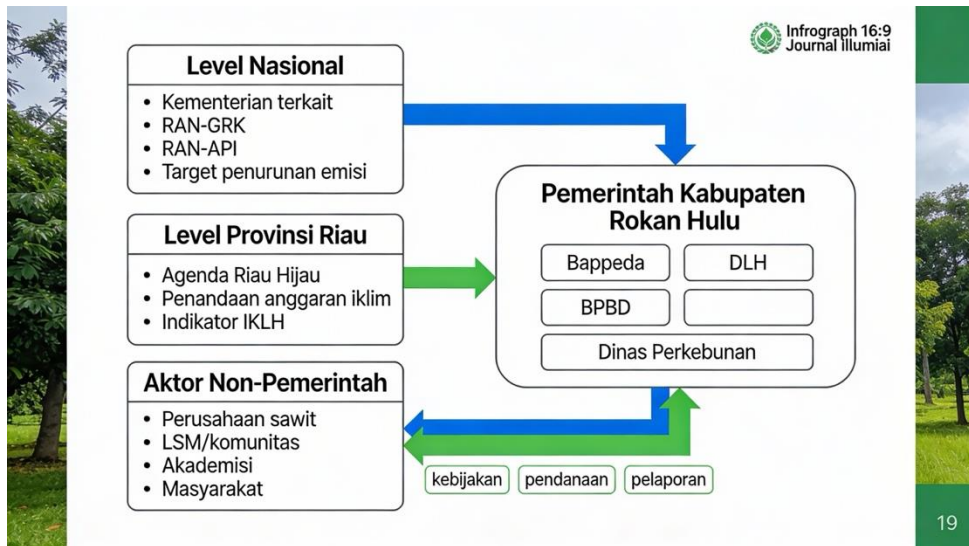
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

berdasarkan struktur umum penelitian kebijakan perubahan iklim di daerah dan kerangka tata kelola iklim nasional-daerah, berikut adalah kerangka naratif hasil dan pembahasan yang dapat digunakan sebagai draf awal, yang selanjutnya perlu Anda lengkapi sendiri dengan data, kutipan, dan rujukan spesifik dari artikel dan dokumen yang sudah diseleksi dalam SLR. Secara umum, hasil penelaahan sistematis menunjukkan bahwa

integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan pemerintah daerah di Indonesia masih berjalan secara bertahap dan cenderung berpusat pada level nasional dan provinsi, sementara tingkat kabupaten berada pada posisi yang lebih lemah dari sisi regulasi, perencanaan, maupun penganggaran. Dalam konteks ini, temuan dari berbagai studi tentang tata kelola perubahan iklim di daerah memperlihatkan pola yang relatif serupa: regulasi nasional dan provinsi telah menyediakan kerangka normatif yang cukup jelas, namun penerjemahan ke kebijakan operasional di tingkat kabupaten sering kali belum konsisten dan belum sepenuhnya memasukkan dimensi mitigasi dan adaptasi secara eksplisit dalam dokumen perencanaan dan program sektoral.

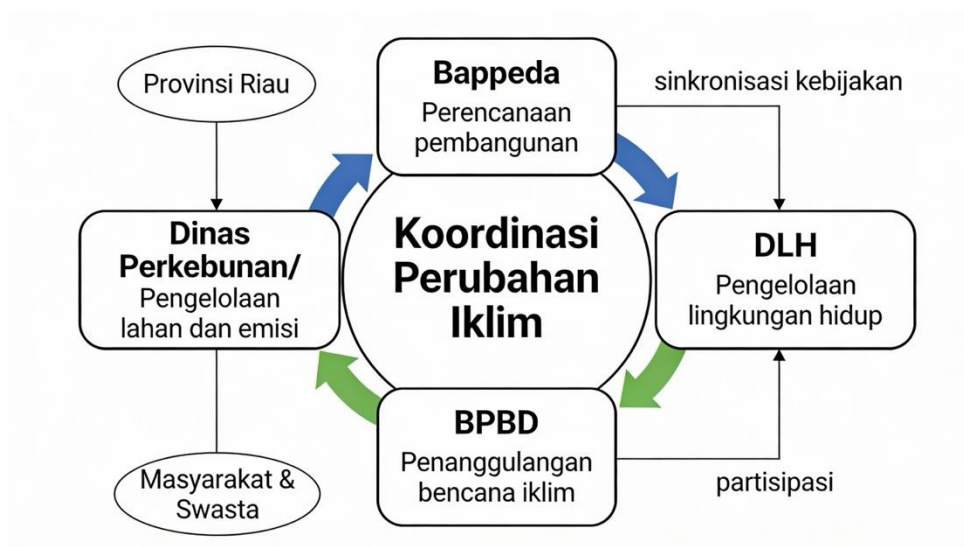
Penelitian yang menggunakan pendekatan Systematic Literature Review memperlihatkan bahwa banyak kajian tentang perubahan iklim di Indonesia masih berfokus pada aspek teknis biofisik (misalnya analisis kerentanan iklim, pola curah hujan, atau dampak karhutla) dan relatif lebih sedikit yang menyoroti secara spesifik bagaimana pemerintah kabupaten mengintegrasikan isu iklim dalam kebijakan dan tata kelola (Fajar & Rafi, 2023). Di sisi lain, kajian di tingkat kota dan provinsi menunjukkan bahwa kerangka multi-level governance menjadi kunci dalam memahami mengapa integrasi perubahan iklim di tingkat lokal tidak selalu sejalan dengan komitmen nasional, karena adanya keterbatasan kapasitas birokrasi, fragmentasi kelembagaan, dan ketergantungan pada program dari atas (top-down). Temuan ini relevan untuk membaca posisi Kabupaten Rokan Hulu sebagai bagian dari Provinsi Riau yang memiliki agenda pembangunan rendah karbon, tetapi dengan realitas kelembagaan dan sumber daya yang mungkin berbeda di tingkat kabupaten.

Hasil pengkodean terhadap literatur yang membahas tata kelola iklim lokal dan kebijakan lingkungan daerah menunjukkan beberapa tema utama yang terkait langsung dengan integrasi isu perubahan iklim di Rokan Hulu. Pertama, tema kerangka hukum dan regulasi memperlihatkan bahwa regulasi nasional tentang perubahan iklim, pengendalian emisi, dan perlindungan lingkungan telah diikuti oleh berbagai kebijakan turunan di tingkat provinsi, termasuk inisiatif pembangunan hijau dan penandaan anggaran perubahan iklim. Namun, pada tingkat kabupaten, regulasi yang ada lebih sering berfokus pada urusan lingkungan hidup secara umum, penataan ruang, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengelolaan sumber daya alam, sementara istilah dan tujuan yang secara eksplisit menyebut perubahan iklim, mitigasi, atau adaptasi masih terbatas atau tersirat (Handayuni et al., 2018).



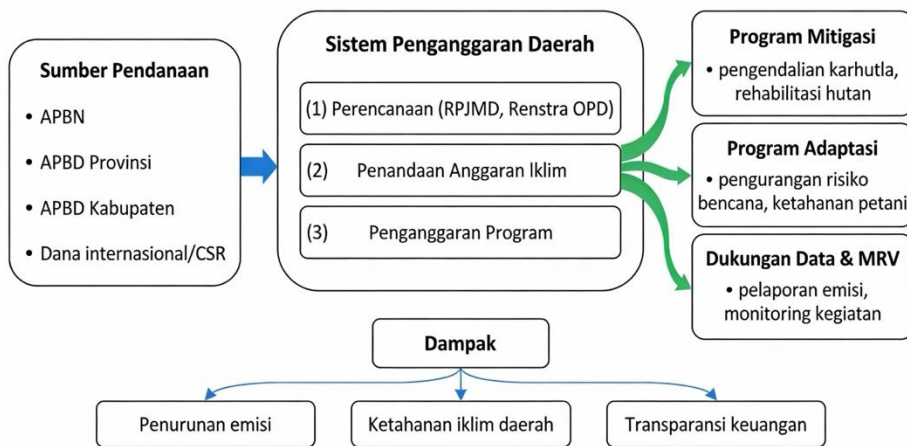
Gambar 1. Skema tata kelola iklim Rokan Hulu.

Kedua, tema kelembagaan dan koordinasi mengindikasikan bahwa struktur organisasi perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, dan penanggulangan bencana telah memegang mandat yang relevan dengan perubahan iklim, tetapi koordinasi formal antar-perangkat daerah dan dengan pemangku kepentingan non-pemerintah belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam kerangka tata kelola iklim. Beberapa studi di daerah lain menunjukkan bahwa pembentukan forum atau kelompok kerja perubahan iklim di tingkat provinsi berhasil memperkuat koordinasi dan knowledge sharing, sementara di tingkat kabupaten, mekanisme semacam ini masih sporadis dan sering bergantung pada proyek atau dukungan program tertentu. Dengan mengacu pada pola ini, dapat disimpulkan bahwa Rokan Hulu kemungkinan menghadapi tantangan serupa, terutama dalam menyinergikan peran dinas lingkungan hidup, Bappeda, dinas pertanian/perkebunan, dan BPBD untuk merespons risiko iklim secara terpadu.



Gambar 2. Skema kelembagaan dan koordinasi perubahan iklim di Rokan Hulu.

Ketiga, dari sisi instrumen kebijakan dan perencanaan pembangunan, hasil penelaahan menunjukkan bahwa dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan di banyak kabupaten/provinsi mulai memasukkan isu pengurangan emisi, rehabilitasi lingkungan, dan pengendalian karhutla, tetapi sering kali masih diposisikan sebagai program sektoral lingkungan dan belum sepenuhnya dipadukan sebagai kerangka pembangunan rendah karbon lintas sektor. Di dalam literatur ditemukan bahwa indikator kinerja yang digunakan pemerintah daerah lebih banyak terkait output fisik (misalnya luas lahan yang direhabilitasi, jumlah pohon yang ditanam, atau jumlah kegiatan sosialisasi), dan belum secara sistematis menggunakan indikator ketahanan iklim atau penurunan emisi gas rumah kaca sebagai tolok ukur kinerja kebijakan (Sutikno et al., 2023). Pola ini memberi indikasi bahwa integrasi isu perubahan iklim di Rokan Hulu perlu dibaca tidak hanya pada tataran redaksi dokumen kebijakan, tetapi juga melalui bagaimana indikator dan program disusun serta bagaimana keterkaitannya dengan target nasional dan provinsi.



Gambar 3. Skema pendanaan dan mekanisme pembiayaan

Keempat, tema pendanaan dan mekanisme pembiayaan mengungkapkan bahwa integrasi perubahan iklim dalam kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana isu ini masuk ke dalam sistem penganggaran. Pengalaman beberapa provinsi yang menerapkan penandaan anggaran perubahan iklim menunjukkan perlunya metodologi yang jelas untuk mengklasifikasikan kegiatan yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi, sehingga dapat diukur kontribusinya terhadap target penurunan emisi (Kustiasih et al., 2014). Untuk Kabupaten Rokan Hulu, hasil kajian literatur memberikan gambaran bahwa, sejauh ini, pembiayaan terkait perubahan iklim kemungkinan besar tersebar dalam berbagai program, seperti pengendalian karhutla, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan limbah, serta pengembangan energi alternatif berbasis limbah sawit, tanpa selalu diberi label sebagai kegiatan iklim. Hal ini menyebabkan sulitnya menilai secara kuantitatif sejauh mana pemerintah kabupaten telah berinvestasi dalam agenda mitigasi dan adaptasi, sehingga menegaskan pentingnya integrasi isu iklim dalam perencanaan dan penganggaran secara lebih eksplisit.

Kelima, tema partisipasi pemangku kepentingan memperlihatkan bahwa di banyak daerah, keterlibatan masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal dalam kebijakan perubahan iklim masih didominasi pada tahap implementasi program (misalnya kegiatan penanaman pohon, pelatihan, atau program CSR), sementara pada tahap perumusan kebijakan formal partisipasi cenderung terbatas. Dalam

konteks Rokan Hulu, berbagai inisiatif yang melibatkan perusahaan perkebunan, kepolisian, dan masyarakat dalam program lingkungan dapat dipandang sebagai modal sosial penting, tetapi literatur menunjukkan bahwa keberlanjutan dan efektivitasnya sangat bergantung pada seberapa jauh inisiatif tersebut dikaitkan dengan kebijakan daerah yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan pemerintah kabupaten tidak hanya persoalan dokumen formal, tetapi juga bagaimana pemerintah membuka ruang kolaborasi dan mengarahkan inisiatif sektoral agar berkontribusi pada tujuan mitigasi dan adaptasi (Muhammad & Aziz, 2020).

Dari sisi analisis kesenjangan, hasil SLR memperlihatkan jarak yang cukup jelas antara kerangka normatif nasional-provinsi dengan implementasi di tingkat kabupaten. Pada satu sisi, komitmen nasional terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim tercermin dalam berbagai strategi dan rencana aksi, termasuk dukungan pendanaan internasional dan skema berbasis kinerja. Di sisi lain, literatur mengenai kabupaten/kota menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah masih memandang perubahan iklim sebagai isu tambahan di bidang lingkungan, bukan sebagai arus utama yang harus mengubah cara perencanaan pembangunan dilakukan. Jika pola ini diproyeksikan ke Kabupaten Rokan Hulu, maka kesenjangan utama yang perlu diantisipasi adalah kurangnya integrasi eksplisit isu iklim dalam RPJMD, keterbatasan indikator dan penganggaran khusus, serta lemahnya mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya pendekatan multi-level governance untuk menjelaskan posisi Kabupaten Rokan Hulu dalam sistem tata kelola iklim Indonesia. Pemerintah kabupaten tidak dapat dipandang sebagai aktor yang sepenuhnya otonom, tetapi berada dalam jaringan hubungan dengan pemerintah pusat dan provinsi, sektor swasta (terutama perusahaan perkebunan dan energi), serta komunitas lokal yang terdampak perubahan iklim. Literatur tentang tata kelola iklim lokal menegaskan bahwa keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan isu iklim ke dalam kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu memanfaatkan instrumen yang disediakan pusat (regulasi, pendanaan, pedoman teknis) sekaligus mengadaptasikannya ke konteks lokal. Pada titik ini, Rokan Hulu memiliki peluang untuk memposisikan diri sebagai kabupaten yang proaktif dalam agenda iklim, misalnya dengan mengembangkan strategi daerah yang secara jelas menyelaraskan pengelolaan perkebunan, kehutanan, dan penanggulangan bencana dengan target penurunan emisi dan ketahanan iklim.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat dipahami sebagai proses yang masih berkembang dan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kelembagaan, dan politik. Kajian literatur menempatkan kabupaten ini dalam lanskap yang lebih luas mengenai tata kelola iklim di Indonesia, di mana daerah dituntut untuk mentransformasikan cara memandang pembangunan dari sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan rendah karbon dan tangguh iklim (Dewi & Istiad, 2016). Dengan mengidentifikasi tema-tema utama, kesenjangan, serta peluang penguatan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi yang lebih operasional, seperti perlunya penyusunan dokumen strategi iklim daerah, penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, pengembangan sistem penandaan anggaran iklim di level kabupaten, serta pemanfaatan kemitraan dengan berbagai aktor untuk mempercepat agenda mitigasi dan adaptasi di Rokan Hulu.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa integrasi isu perubahan iklim dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam perencanaan, penganggaran, maupun kelembagaan daerah. Kerangka normatif di tingkat nasional dan provinsi sebenarnya sudah relatif maju, tetapi pada level kabupaten isu perubahan iklim cenderung muncul secara tersirat melalui program lingkungan, penanggulangan bencana, dan pengelolaan sumber daya alam, tanpa indikator dan label kebijakan iklim yang jelas. Analisis tematik memperlihatkan adanya kelemahan pada aspek regulasi yang spesifik tentang iklim, koordinasi lintas perangkat daerah, penandaan anggaran, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, yang secara bersama-sama menciptakan kesenjangan antara komitmen makro dan praktik di lapangan.

Dalam perspektif tata kelola multi-level, posisi Rokan Hulu sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan pusat dan provinsi, namun tetap memiliki ruang untuk menjadi lebih proaktif melalui penguatan dokumen perencanaan yang eksplisit memuat agenda mitigasi dan adaptasi,

pembentukan atau penguatan forum koordinasi iklim daerah, dan pengembangan mekanisme pembiayaan yang mampu melacak kontribusi program terhadap penurunan emisi dan peningkatan ketahanan iklim. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penyusunan strategi iklim daerah yang terintegrasi dan berbasis bukti, agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat bergerak dari pendekatan sektoral yang parsial menuju tata kelola iklim yang lebih sistematis, kolaboratif, dan selaras dengan target pembangunan rendah karbon nasional dan Provinsi Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dewi, I. K., & Istiadi, Y. (2016). Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam menghadapi perubahan iklim di kampung naga kecamatan salawu kabupaten tasikmalaya (disaster mitigation on traditional community against climate change in kampong naga subdistrict salawu tasikmalaya). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(1), 129–135.
- Fajar, M. F. A., & Rafi, M. H. D. R. Y. (2023). Kebijakan Mitigasi Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(1), 10–31.
- Handayuni, L., Amran, A., & Razak, A. (2018). KAJIAN DAMPAK KARHUTLA (KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN) PROVINSI RIAU TERHADAP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA PENYAKIT ISPA DI KOTA PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT. *Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018*, 1(1).
- Komarlah, A., & Satori, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Kustiasih, T., Setyawati, L. M., Anggraeni, F., Darwati, S., & Aryenti, A. (2014). Faktor Penentu Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Permukiman*, 9(2), 78–90.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *Bmj*, 339.
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/223>
- 5

- Mustikaningsih, W., & Ananda, A. R. (2025). Politik Ketahanan Iklim: Analisis Tata Kelola Bencana Banjir dan Transformasi Kerentanan Sosial-Ekonomi Masyarakat Urban di Era Disrupsi Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(8), 564–573.
- Soejachmoen, K. (2017). *Ancaman Serius Perubahan Iklim di Indonesia*. 1. <https://www.dw.com/id/ancaman-serius-perubahan-iklim-di-indonesia/a-19196264>
- Sutikno, M. A. F., Rahmawati, D., Prahmani, Y. S., & ... (2023). Program Penguatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sampah, Air dan Sanitasi Guna Mewujudkan Kampung Iklim Kelurahan Tugurejo. *Jurnal Pemberdayaan* <http://ykgm.org/index.php/jpm/article/view/291>
- Van Dinter, R., Tekinerdogan, B., & Catal, C. (2021). Automation of systematic literature reviews: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 136, 106589.
- Wahyudi, H., Anugerah, M. F., & Arif, M. (2021). Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 4(2), 44–61.
- Zulaeha, M., Ariany, L., Dwifama, A. H., Falmelia, R. A., & Ridhani, M. S. (2022). Mitigasi bencana perspektif kebijakan publik dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(3).